

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

I Made Wardana¹

1. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Margarana Tabanan

Email korespondensi: madew711@gmail.com

How to Cite:

Wardana, I. M. (2026). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Widya Mahavira*, 2(1), 30-35

Abstract- *This research examines political participation of Punggul Village community in the 2024 simultaneous regional head elections in Abiansemal District, Badung Regency. Using qualitative descriptive methods with 12 informants, the study found that political participation was classified as passive, with only 87.83% voter turnout, while youth participation (ages 17-30) was notably lower at 21.3%. Key findings indicate that political participation occurred primarily in three phases: before election (limited involvement in campaigns and political discussions), during election (voter turnout), and after election (acceptance of results). Driving factors included political stimulation reception, personal characteristics, social characteristics, and conducive political environment. Meanwhile, inhibiting factors consisted of residence outside the village, work and study commitments, low government trust, insufficient political education, household responsibilities, feelings of inadequacy, limited political socialization, and weaknesses in voter list compilation. The study concludes that community political participation remains largely passive, though some citizens demonstrated active participation through compliance with government decisions and acceptance of election outcomes.*

Keyword: *democracy; political education; political participation; regional elections; voter behavior*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara (Budiardjo, 2009). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Badung, Bali. Desa Punggul sebagai salah satu desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, memiliki 2.569 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024. Namun, data dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Punggul menunjukkan bahwa terdapat 216 pemilih atau sekitar 13% yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam DPT. Fenomena rendahnya partisipasi politik ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu oleh Kalasuba (2023) tentang pola partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pemasang menemukan bahwa partisipasi pemilih mencapai 75%, dengan preferensi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor pembangunan infrastruktur, peningkatan UMR, dan lapangan kerja. Sementara itu, Iskandar (2020) dalam penelitiannya di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa partisipasi politik meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, didukung oleh faktor ekonomi dan sosial meskipun dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Berbeda dengan

penelitian sebelumnya yang menggunakan teori partisipasi politik dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Kalasuba, 2023) serta Miriam Budiardjo dan Ramlan Surbakti (Iskandar, 2020), penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Gabriel Almond yang membagi partisipasi politik menjadi partisipasi konvensional dan nonkonvensional. *Research gap* yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah minimnya kajian mengenai partisipasi politik pemilih muda di wilayah pedesaan Bali, khususnya dalam konteks Pilkada serentak tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Punggul; dan (2) apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Punggul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola partisipasi politik masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Punggul. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori partisipasi politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah di wilayah pedesaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu (KPU) dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian adalah Desa Punggul, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung, dengan rentang waktu penelitian selama tiga bulan (Januari–Maret 2025). Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji fenomena partisipasi politik masyarakat dalam konteks alamiah. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Total informan berjumlah 12 orang yang terdiri dari: (1) Komisioner KPU Kabupaten Badung, (2) Anggota PPS Desa Punggul, (3) Pengawas Pemilu Desa (PKD), (4) Klian Banjar Adat, (5) Tokoh pemuda/Karang Taruna, (6) Mahasiswa, (7) Tokoh masyarakat, (8) Sopir, (9) Ibu rumah tangga, (10) Karyawati, dan (11–12) Masyarakat umum.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi PPS Desa Punggul, data KPUD Kabupaten Badung, serta literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) Observasi partisipatif untuk mengamati aktivitas politik masyarakat, (2) Wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, (3) Dokumentasi berupa foto kegiatan, data pemilih, dan hasil rekapitulasi suara, serta (4) Studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) Reduksi data, yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara dan observasi; (2) Penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan bagan; serta (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking*.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Partisipasi Politik Masyarakat Desa Punggul

Partisipasi politik masyarakat Desa Punggul dalam Pilkada 2024 dapat dibagi menjadi tiga fase: sebelum pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan setelah pemilihan. Pada fase sebelum pemilihan, masyarakat Desa Punggul menunjukkan partisipasi yang bervariasi dalam diskusi politik dan kegiatan kampanye.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2024 di Desa Punggul Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung

Tabel 1. Data Pemilih Tetap (DPT) Desa Punggul Pilkada 2024

No	TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Br. Teguan	253	262	515
2	Br. Kelodan + Br. Trinadi	247	268	515
3	Br. Padang	244	271	515
4	Br. Tengah	248	260	508
5	Br. Tengah+Br.Teguan+Br.Trinadi	249	267	516
Total		1.241	1.328	2.569

Sumber: PPS Desa Punggul (2024)

Diskusi politik informal lebih sering terjadi dibandingkan diskusi formal. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat cenderung membicarakan Pilkada dengan keluarga, rekan kerja, atau teman secara santai. Hal ini sejalan dengan pendapat Komisioner KPU Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi pasif yang paling sederhana adalah diskusi politik informal dalam suasana santai. Kegiatan kampanye di Desa Punggul hanya dilakukan sekali oleh salah satu pasangan calon. Partisipasi masyarakat dalam kampanye tergolong rendah, dengan hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir. Berdasarkan pengakuan PKD Desa Punggul, kampanye di tingkat desa kurang gencar dibandingkan saat pemilu legislatif, dengan tim sukses lebih fokus pada kampanye di tingkat kecamatan.

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024

Paslon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
01 - I Wayan Suyasa & I Putu Alit Yandinata	120	161	110	102	120	613
02 - I Wayan Adi Arnawa & I Bagus Alit Sucipta	356	310	374	319	325	1.684
Suara Sah	476	471	484	421	445	2.297
Suara Tidak Sah	17	9	9	19	17	71

Sumber: KPU Kabupaten Badung (2024)

Pada fase pelaksanaan pemilihan, tingkat partisipasi pemilih Desa Punggul mencapai 87,83% (2.368 dari 2.580 pemilih). Namun, dari data tersebut terlihat bahwa 216 pemilih (13%) tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi adalah berdomisili di luar Desa Punggul, kesibukan pekerjaan, kesibukan sebagai pelajar/mahasiswa, dan kelemahan dalam penyusunan DPT.

Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik

Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat Desa Punggul meliputi: (1) Penerimaan perangsang politik dari media massa, keluarga, dan lingkungan sosial. Informan mengaku mendapat informasi Pilkada dari televisi, media sosial, dan diskusi dengan keluarga. (2) Karakteristik pribadi yang memiliki kepedulian terhadap politik. Beberapa informan yang aktif mengikuti kegiatan politik menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu-isu politik. (3) Karakteristik sosial yang mendukung, seperti lingkungan kerja atau kampus yang aktif membahas politik. (4) Lingkungan politik yang kondusif sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat.

Tabel 3. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik

Kategori	Faktor	Deskripsi
Pendorong	Perangsang Politik	Media massa, keluarga, lingkungan sosial
	Karakteristik Pribadi	Kepedulian dan minat terhadap politik
	Karakteristik Sosial	Lingkungan kerja/kampus yang aktif secara politik
	Lingkungan Politik	Sistem demokrasi yang kondusif
	Domisili	Berdomisili di luar Desa Punggul

Kategori	Faktor	Deskripsi
Penghambat	Kesibukan Pekerjaan	Waktu kerja bertabrakan dengan waktu pemilihan
	Kesibukan Pendidikan	Aktivitas sebagai pelajar/mahasiswa
	Kepercayaan Rendah	Rendahnya kepercayaan kepada pemerintah
	Pendidikan Politik	Kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik
	Kesibukan Rumah Tangga	Kesibukan mengurus keluarga dan rumah tangga
	Perasaan Tidak Mampu	Merasa tidak paham dan tidak mampu berpartisipasi
	Kelemahan DPT	Masalah dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Sumber: Data Penelitian (2025)

Faktor penghambat yang paling dominan adalah kesibukan pekerjaan dan pendidikan. Banyak pemilih muda yang tidak hadir karena kuliah atau bekerja di luar daerah. Selain itu, kurangnya pendidikan politik menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Hal ini sejalan dengan temuan Muslimin (2019) bahwa kurangnya kesadaran politik menjadi faktor utama rendahnya partisipasi. Temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya pengaruh keluarga dalam menentukan pilihan politik. Beberapa informan mengaku memilih berdasarkan saran orang tua atau anggota keluarga lain, menunjukkan bahwa partisipasi politik belum sepenuhnya mandiri. Fenomena ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh patron-klien dalam politik lokal di Bali.

Pada fase setelah pemilihan, sebagian besar masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan menerima hasil pemilihan dan keputusan pemerintah. Tidak ada penolakan signifikan terhadap hasil Pilkada, dan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi tanpa keberatan. Hal ini menunjukkan kedewasaan politik masyarakat dalam menerima hasil demokrasi. Dibandingkan dengan penelitian Kalasuba (2023) di Pemalang yang menunjukkan partisipasi 75%, dan Iskandar (2020) di Tangerang Selatan yang menunjukkan peningkatan partisipasi, Desa Punggul memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi (87,83%). Namun, jika dilihat dari segmen pemilih muda, partisipasinya masih rendah (21,3%), menunjukkan perlunya strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi generasi muda.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Punggul dalam Pilkada serentak 2024 tergolong dalam kategori partisipasi pasif. Meskipun tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan mencapai 87,83%, sebagian besar informan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sebelum pemilihan seperti diskusi politik formal dan kampanye. Partisipasi lebih banyak terjadi dalam bentuk pasif seperti diskusi informal dan mengikuti berita di media massa. Namun demikian, terdapat bentuk partisipasi aktif yang ditunjukkan masyarakat, yaitu dengan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah, khususnya dalam menerima hasil akhir Pilkada 2024 tanpa penolakan berarti. Hal ini mencerminkan kedewasaan politik masyarakat dalam menghormati proses demokrasi.

Faktor pendorong partisipasi politik meliputi penerimaan perangsang politik dari berbagai sumber (media, keluarga, lingkungan), karakteristik pribadi yang peduli terhadap politik, karakteristik sosial yang mendukung, dan lingkungan politik yang kondusif. Sementara faktor penghambat terdiri dari berdomisili di luar desa, kesibukan pekerjaan dan pendidikan, kepercayaan rendah terhadap pemerintah, kurangnya pendidikan politik, kesibukan rumah tangga, perasaan tidak mampu, minimnya sosialisasi politik, dan kelemahan dalam penyusunan DPT. Penelitian ini merekomendasikan agar KPU

dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik, khususnya bagi pemilih muda. Diperlukan strategi khusus seperti pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan penyempurnaan sistem DPT. Partai politik juga perlu mengoptimalkan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik dan melakukan rekrutmen kader yang berkualitas.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya fokus pada satu desa sehingga belum dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak segmen pemilih dengan karakteristik berbeda, dan menganalisis lebih mendalam tentang perilaku politik pemilih muda di era digital. Selain itu, perlu dikaji faktor budaya lokal Bali yang mempengaruhi pola partisipasi politik masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, I. (2001). *Al-ahkam al-shultaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Jakarta: PT Darul Falah.
- Althoff, P. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, H. (2001). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. (2007). *Ilmu kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gatara, A. A. S., & Said, M. D. (2011). *Sosiologi politik: Konsep dan dinamika perkembangan kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Iskandar, R. (2020). Partisipasi politik dan pilkada: Studi kasus partisipasi politik masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pilkada tahun 2020 di masa pandemi. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(2), 45–62.
- Irtanto. (2008). *Dinamika politik lokal era otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kalasuba, M. A. (2023). Pola partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang (Studi kasus di Desa Banjardawa). *Jurnal Demokrasi Lokal*, 8(1), 78–95.
- Mas'oed, M., & MacAndrews, C. (2011). *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- McClosky, H. (1972). Political participation. In *International encyclopedia of the social sciences* (2nd ed.). New York: The Macmillan Company.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslimin. (2019). Partisipasi politik masyarakat: Studi kasus kolom kosong dalam pilkada serentak di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(3), 112–128.
- Netra, I. B. (2001). *Metodologi penelitian*. Singaraja: Biro Penelitian dan Penerbitan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana.
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku organisasi* (Edisi ke-10). Jakarta: Prentice Hall.
- Rush, M., & Althoff, P. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan politik Indonesia*. Yogyakarta: CV Rajawali.
- Sardiman. (2001). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2004). *Sistem politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surachmad, W. (2001). *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar metode teknik*. Bandung: Tarsito.
- Umar, H. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, A. W. (2000). *Ilmu komunikasi: Pengantar studi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuhro, R. S., dkk. (2009). *Demokrasi lokal: Perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Jakarta: Ombak.

KPU Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*.

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.